

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992).
- Bank Indonesia. *Penerapan Z-score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).
- Cox, James & Lee Hazen, Thomas, dkk, *Corporations, Alpen Law & Business*, (Aspen Publisher, 1977).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*, (Bandung: Alumni 2007).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Khaira, Amalia F. *Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal*, (Medan: USU Press, 2008).
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektid Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Lotulung, Prof. Dr. Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998).
- Muljadi, Kartini. *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Dalam: Rudy A Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

- Nating, Imran. *Tanggung Jawab Kuraton dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara) 2003.
- Pramono, Nindyo. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2012).
- Priyo, Yudhi. *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*, (Malang: Setara Press, 2020).
- Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan Memahami faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Remy, Sutan. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Robert, *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016).
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 1992).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009).

Sastrawidjaja, H. Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Suyudi, Aria & Nugroho, Eryanto Nugroho dkk. *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003).

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Yani, Ahmad & Widjaja. Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Yussarie, Emmy. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

## **Jurnal**

Ginting, Mitha Christina. “Pengaruh *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Property & Real Estate di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Manajemen* 3. No. 2, Desember, 2017.

Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana dan Suyatna, I Nyoman, “Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2, 2020.

Mulyani Zulaeha, “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, No. 2, Desember 2015.

Platt, Harlan, & Platt, Marjorie B. “*Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-based Sample Bias*”, *Journal of Economics and Finance* 26, No. 2, June, 2002, <https://doi.org/10.1007/BF02755985>.

Permatasari, Pita. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, No. 2, 2014. [10.15408/sjsbs.v1i2.1547](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1547).

Tanjung, Titin Sukma, dkk. “Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. PLN (persero) Area Padang”, *Jurnal Akuntansi UPI YPTK*, 2012.

### **Tesis**

Ardhita Pramudya, “Penormaan Prinsip Debt Forgiveness dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia.”, Tesis Universitas Airlangga, 2017.

Gross, Karen. “*Failure and Forgiveness: Rebalancing The Bankruptcy System*” Yale University, 1999.

Haryanto, Boedi. “Prinsip Solvabilitas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kepailitan”, Tesis Disertasi, Universitas Airlangga, 2020.

Khasanah, Candy Nurul. “Tinjauan Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Debitor (*Voluntary Petition*): Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Kepailitan PT. Mandala Airlines”, Tesis Sarjana, Universitas Indonesia, 2016.

Simamora, Y. Sogar. “Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah”, Tesis Disertasi, Universitas Airlangga, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 /KMK.06/2002

Tentang Jasa Akuntan Publik.

### **Artikel**

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), “3

*Important Facts about the Ease of Doing Business Indonesia*”, (Artikel

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Rizky Dwinanto, “*Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam*

*Kepailitan dan PKPU*”, 2019.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt Pst tanggal 9 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 21 September 1999.